

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji, dapat diketahui bahwa **terdapat patologi birokrasi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukahaji**. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan informasi dari pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap alokasi anggaran terhadap program Kotaku yang ada di Kota Bandung, secara khusus di kelurahan Sukahaji. Permasalahan mengenai pengembalian dana alokasi pada tahun 2018 ke BPKP yang kemudian menggunakan anggaran dari BDI untuk pelaksanaan program Kotaku. Kemudian berhenti dilaksanakan lagi ada tahun 2019 hingga tahun 2022.

Patologi dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori dari Sondang P. Siagian (1994). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa yang mempengaruhi pelaksanaan program Kotaku, yaitu sebagai berikut.

1. Koordinasi dan Komunikasi

Terkait koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program Kotaku, terdapat hierarki mulai dari pemerintah pusat dilanjutkan kepada pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota yang berkoordinasi dengan BKM kelurahan Sukahaji bersama jajarannya yakni KSM yang nanti melakukan koordinasi bersama masyarakat di kelurahan Sukahaji.

Sedangkan komunikasi yang dilakukan adalah pemberitahuan langsung dari BKM kepada KSM untuk diinformasikan kepada warga

kelurahan Sukahaji tentang anggaran yang diterima untuk pelaksanaan proyek dari program Kotaku.

Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa program pemerintah mengalami patologi birokrasi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi dalam sistemnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

- a. Identifikasi patologi birokrasi: Penelitian ini telah mengidentifikasi adanya patologi birokrasi pada program pemerintah, terutama terkait dengan miskomunikasi dalam sistemnya. Miskomunikasi terjadi ketika informasi tidak disampaikan kurang jelas dimana pihak kelurahan beserta jajarannya BKM tidak mendapat penjelasan atas pemberhentian alokasi anggaran sejak 2018 hingga 2022, dan hal lainnya terkait pesan/informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak lengkap pada kasus pengajuan proposal anggaran program Kotaku di tahun 2018 dimana terjadi pengembalian dana karena proposal dinilai tidak sesuai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang informasi standar apa yang dibutuhkan untuk pembuatan proposal rekening anggaran program Kotaku.
- b. Dampak negatif patologi birokrasi: Patologi birokrasi yang disebabkan oleh miskomunikasi memiliki dampak negatif pada program pemerintah. Hal ini dapat menjadi penyebab berupa kesalahan pengambilan keputusan, penurunan kinerja,

pemborosan sumber daya, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- c. Perlu perbaikan dalam sistem komunikasi: Untuk mengatasi patologi birokrasi ini, diperlukan perbaikan dalam sistem komunikasi di dalam program pemerintah. Perlu ada saluran komunikasi yang jelas dan efektif antara berbagai unit dan individu yang terlibat dalam program. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Keadilan Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran program pemerintah kepada setiap kelurahan cenderung tidak adil. Terdapat ketimpangan yang signifikan dalam penyaluran anggaran yang diberikan kepada kelurahan-kelurahan yang berbeda dengan beberapa kelurahan menerima alokasi anggaran sedangkan yang lainnya tidak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang tidak seimbang dalam distribusi sumber daya.
- b. Faktor-faktor politik dan kepentingan kelompok tertentu mempengaruhi alokasi anggaran. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran program pemerintah cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan berdasarkan kebutuhan dan potensi perkembangan setiap kelurahan. Kepentingan kelompok tertentu, seperti kelompok yang memiliki hubungan dekat

dengan pemerintah atau memiliki kekuatan politik yang kuat, dapat mempengaruhi alokasi anggaran.

- c. Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses alokasi anggaran menjadi hambatan dalam mencapai keadilan. Keterbatasan informasi yang tersedia dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran menyebabkan proses tersebut tidak transparan. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi dalam alokasi anggaran.
- d. Dampak dari alokasi anggaran yang tidak adil adalah meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi antar kelurahan. Kelurahan-kelurahan yang menerima alokasi anggaran yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan kesempatan pembangunan. Sementara itu, kelurahan-kelurahan yang tidak menerima alokasi anggaran, akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah sosial-ekonomi yang mereka hadapi.
- e. Untuk mencapai keadilan dalam alokasi anggaran program pemerintah kepada setiap kelurahan, diperlukan reformasi kebijakan dan perbaikan dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam proses alokasi anggaran dapat membantu mengurangi ketimpangan yang ada. Selain itu, penting untuk

mengurangi pengaruh politik dan memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kriteria yang adil, seperti kebutuhan dan potensi perkembangan setiap kelurahan.

Dalam rangka mencapai efektivitas program pemerintah, perbaikan sistem komunikasi yang mengurangi miskomunikasi harus menjadi prioritas, serta perlunya perbaikan dalam alokasi anggaran program pemerintah kepada setiap kelurahan guna mencapai keadilan yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah. Dengan demikian, kinerja program pemerintah dapat ditingkatkan, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan, dan tujuan program dapat tercapai dengan lebih efisien dan efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap patologi birokrasi pada program Kotaku yang dilakukan penelitian di kelurahan Sukahaji, maka peneliti mencoba memberikan saran terhadap pelaksanaan program Kotaku di waktu yang akan datang sebagai upaya untuk meningkatkan dampak dari adanya implementasi program Kotaku khususnya di kelurahan Sukahaji. Saran-saran tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Melakukan peningkatan transparansi informasi dalam program Kotaku. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme publikasi informasi yakni dapat berupa anggaran, proses pengambilan keputusan, serta mengkomunikasikan kepada masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi dan mengawasi pelaksanaan program.

2. Melakukan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat mengenai ketidakpuasan atau ketidakadilan dari pelaksanaan program pemerintah yakni dalam konteks program Kotaku. Mekanisme ini mengatur tentang saluran untuk menyampaikan keluhan, memberikan ruang untuk berpendapat, melaporkan jika terjadi penyimpangan, serta ruang untuk memberikan solusi yang tepat.
3. Menggunakan kriteria alokasi yang objektif yang bertujuan agar pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan kriteria alokasi yang adil dan objektif. Kriteria tersebut harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan potensi perkembangan setiap kelurahan, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap layanan dasar, dan infrastruktur yang ada. Dengan menggunakan kriteria yang jelas dan transparan, akan lebih mudah untuk memastikan alokasi anggaran yang adil dan tidak terpengaruh oleh faktor politik atau kepentingan kelompok tertentu.
4. Melibatkan media dan LSM sebagai mitra untuk melakukan pengawasan dan memberikan liputan terhadap pelaksanaan program Kotaku. Tujuannya untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program Kotaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Caiden, G-E. (1991) What Really Is Public Maladministration. *Blackwell Publishing, 51*, 491-492.
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2003). *Reformasi tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia
- Maolani, dkk. (2022) Patologi Birokrasi dan Uapaya Pencegahannya Untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien. *Jurnal DIALETIKA, 19*, 50-51.
- Ma'ruf, M. (2010) Patologi Birokrasi. *Jurnal Visioner, 4*, 1-2.
- Siagian, Sondang P. (1994). *Patologi Birokrasi: Analisis, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukardi, D. K. (1985). *Pengantar Teori Konseling (Suatu Uraian Ringkas)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Internet

- Miftah. (2017). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai direalisasikan di Kota Bandung. Diakses melalui website

<https://www.bandung.go.id/news/read/4165/program-kota-tanpa-kumuh-kotaku-mulai-direalisasikan-di-kota-bandung#:~:text=di%20Kota%20Bandung.,Pemerintah%20Kota%20Bandung%20mulai%20merealisasikan%20program%20Kotaku%20> pada tanggal 20 Oktober 2022.

Kompas.TV. (2021). Bahaya patologi Birokrasi! Contoh Terbaru, Kasus mafia Tanah Menimpa Nirina Zubir. Diakses melalui website <https://www.kompas.tv/nasional/234614/bahaya-patologi-birokrasi-contoh-terbarunya-kasus-mafia-tanah-yang-menimpa-nirina-zubir?page=all> pada tanggal 20 Oktober 2022.

Humas MENPANRB. (2021). Komitment Hingga Pola Pikir, Penyebab Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi. Diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/komitmen-hingga-pola-pikir-penyebab-belum-optimalnya-reformasi-birokrasi> pada tanggal 20 Oktober 2022.

Wulandari, Dewi Ayu. (2021). Merajut Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Berkualitas. Diakses melalui website <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--merajut-reformasi-birokrasi-melalui-pelayanan-publik-berkualitas#:~:text=Birokrasi%20telah%20memegang%20peran%20utama,berkaitan%20dengan%20fungsi%20pelayanan%20publik> pada tanggal 21 Oktober 2023

KementerianPUPR. (2021). Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Diakses melalui website <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> pada tanggal 22 Oktober 2022.

BPS Kota Bandung. (2021). Banyaknya Lokasi, Bangunan Rumah dan Jumlah

Keluarga di Bantaran Sungai dan permukiman Kumuh per Kecamatan di

Kota bandung 2021. Diakses melalui website

[https://bandungkota.bps.go.id/indicator/29/1139/1/banyaknya-lokasi-](https://bandungkota.bps.go.id/indicator/29/1139/1/banyaknya-lokasi-bangunan-rumah-dan-jumlah-keluarga-di-bantaran-sungai-dan-permukiman-kumuh-per-kecamatan-di-kota-bandung.html)

[bangunan-rumah-dan-jumlah-keluarga-di-bantaran-sungai-dan-](https://bandungkota.bps.go.id/indicator/29/1139/1/banyaknya-lokasi-bangunan-rumah-dan-jumlah-keluarga-di-bantaran-sungai-dan-permukiman-kumuh-per-kecamatan-di-kota-bandung.html)

[permukiman-kumuh-per-kecamatan-di-kota-bandung.html](https://bandungkota.bps.go.id/indicator/29/1139/1/banyaknya-lokasi-bangunan-rumah-dan-jumlah-keluarga-di-bantaran-sungai-dan-permukiman-kumuh-per-kecamatan-di-kota-bandung.html) pada tanggal 27

Oktober 2022.

Kumparan.com. (2021). Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, dan

Contohnya. Diakses melalui website [https://kumparan.com/berita-hari-](https://kumparan.com/berita-hari-ini/kerangka-berpikir-pengertian-cara-membuat-dan-contohnya-1vs3Xt48y6k/full)

[ini/kerangka-berpikir-pengertian-cara-membuat-dan-contohnya-](https://kumparan.com/berita-hari-ini/kerangka-berpikir-pengertian-cara-membuat-dan-contohnya-1vs3Xt48y6k/full)

[1vs3Xt48y6k/full](https://kumparan.com/berita-hari-ini/kerangka-berpikir-pengertian-cara-membuat-dan-contohnya-1vs3Xt48y6k/full) pada tanggal 17 November 2022.

Kementerian PUPR. (2019). Transformasi BKM: Menyegarkan Kembali

Pengertian BKM/LKM. Diakses melalui website

[https://kotaku.pu.go.id/view/7643/transformasi-bkm-menyegarkan-](https://kotaku.pu.go.id/view/7643/transformasi-bkm-menyegarkan-kembali-pengertian-bkm-lkm)

[kembali-pengertian-bkm-lkm](https://kotaku.pu.go.id/view/7643/transformasi-bkm-menyegarkan-kembali-pengertian-bkm-lkm) pada 2 Mei 2023.

Berita nasional (Seputar Ditjen Perbendaharaan). (2022). Menkeu tegaskan

Pentingnya Akuntabilitas dalam pengelolaan APBN dan APBD. Diakses

melalui

websiten[https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/3968-](https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/3968-menkeu-tegaskan-pentingnya-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-apbn-dan-apbd.html)

[menkeu-tegaskan-pentingnya-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-apbn-dan-](https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/3968-menkeu-tegaskan-pentingnya-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-apbn-dan-apbd.html)

[apbd.html](https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/3968-menkeu-tegaskan-pentingnya-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-apbn-dan-apbd.html) pada 17 Juni 2023.

Peraturan, Undang-Undang, dan Dokumen Pemerintah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016
tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Jufri, L. M., Jalaudin, M., Sugiyanto., & Widodo, P. (2021) Prosedur Operasional
Standar (POS) Perencanaan dan Pelaksanaan Infrastruktur Skala Kawasan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.